

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah, menunjukkan bahwa program kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010 : 96) yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
 - a. Pada Aspek dimensi komunikasi, bahwa penyampaian informasi Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tingkat SMP telah berjalan optimal karena informasi sudah sampai kepada orang tua siswa, karena orang tua siswa datang langsung kesekolah untuk menanyakan informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah dan juga peneliti melihat informasi tentang alur pendaftaran PPDB yang dipasang pada papan pengumuman disekolah. Selanjutnya, parameter penyampaian sosialisasi aturan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tingkat SMP belum berjalan optimal karena sosialisasi sudah sampai kepada orang tua siswa, tetapi masih

ada orang tua siswa yang belum mengerti terkait aturan PPDB sistem zonasi ini, karena menurut peneliti kurangnya edukasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait PPDB. Dimensi komunikasi dengan parameter penyampaian konsistensi aturan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tingkat SMP kurang optimal karena konsistensi dari Pihak Sekolah masih terdapat penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, adanya praktek jual beli kursi di sekolah-sekolah yang dianggap oleh sebagian orangtua siswa adanya ketidak jujuran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

- b. Pada Aspek Dimensi Sumberdaya, dengan parameter sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan aturan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi sudah cukup optimal, karena Dinas Pendidikan sendiri mempunyai fasilitas pendukung seperti peralatan komputer yang memadai dan ruangan-ruangan. Dan sekolah-sekolah juga mempunyai fasilitas yang cukup memadai terdapat komputer, ruang pendaftaran online untuk menunjang PPDB. menyimpulkan bahwa untuk Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Kebijakan PPDB telah cukup optimal, dilihat dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun, hanya saja yang perlu ditingkatkan menurut peneliti adalah Anggaran untuk pelaksanaan kurikulum pengajaran disekolah-sekolah yang perlu ditingkatkan, tidak cukup hanya biaya pendaftaran saja yang di gratiskan,

perlu yang ditingkatkan biaya sekolah yang ringan yang ditanggung oleh orang tua siswa.

- c. Pada Aspek komitmen yang di pegang oleh aparatur dinas atau pun sekolah, mereka telah memegang teguh komitmennya, hal itu terlihat bagaimana pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terus berlanjut dari tahun ke tahun, hanya saja, yang perlu di perbaiki adalah sasaran dari aturan ini seperti orang tua calon siswa belum mengerti sepenuhnya kebijakan PPDB, sehingga banyak yang beranggapan bahwa aturan PPDB ini tidak membantu masyarakat, melainkan malah menumbuhkan praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru, dan menimbulkan kekecewaan yang besar dari siswa atau orang tua siswa yang anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah yang diinginkannya, karena terkendala aturan kebijakan sistem zonasi tersebut.
- d. Pada Aspek Struktur Birokrasi, melalui tiga parameter yaitu adanya tanggung jawab dari petugas pelaksana PPDB, adanya pembagian tugas, adanya koordinasi Dinas pendidikan dan pihak sekolah dengan lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, yang dilaksanakan di 2 (dua) sekolah SMP Negeri yang ada di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dirasa sudah cukup berjalan optimal dilihat dari parameter koordinasi tersebut yaitu sekolah sebagai petugas pelaksana selalu berkoordinasi dengan aparat pemerinthan setempat untuk mensukseskan kegiatan PPDB sistem zonasi, sedangkan untuk parameter Tanggungjawab dinas pendidikan akan bertanggungjawab apabila

ada sekolah yang tidak bisa menyelesaikan masalah terkait PPDB, dan untuk parameter pembagian tugas yang di pegang oleh aparatur dinas pendidikan atau pun sekolah, meraka telah memegang teguh tugas nya hal itu telah disampaikan oleh para penanggungjawab panitia kebijakan PPDB.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Optimalisasi Kebijakan PPDB Sistem

Zonasi di Kabupaten Bandung antara lain:

a. Faktor Pendukung

- a) Sumberdaya yang memadai.
- b) Sarana dan prasarana.
- c) Anggaran.

b. Faktor Penghambat :

- a) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Kurangnya Kerjasama
- c) Kurangnya konsistensi dari pihak sekolah.
- d) Ketidaktahuan Masyarakat Dalam Sistem PPDB Online.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung yaitu dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan edaran pengumuman PPDB ke sasaran tingkat sekolah, mengirim guru ke sasaran tingkat sekolah untuk membujuk siswa kelas SMP yang baru selesai ujian, dan minta tolong kepada perangkat

desa pada sekolah sasaran untuk memotivasi orang tua calon peserta didik agar menyekolahkan anak-anaknya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tentang berbagai regulasi pemerintah terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam perihal prosedur dan kebijakan yang ditentukan dalam rangka lebih memperbaiki dan lebih melengkapi hasil penelitiannya, serta dapat menghasilkan *output* yang lebih bermanfaat untuk masa yang akan datang.

5.2.2 Saran Praktis

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana PPDB harus dilakukan semaksimal mungkin, agar masyarakat pun memahi dan mampu berkontribusi agar program kebijakan tersebut optimal.
- b. Meningkatkan SDM pelaksana dan sarana prasarana agar masyarakat berpartisipasi ada dalam program PPDB Sistem Zonasi.
- c. Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Tim Pelaksana Kegiatan PPDB selayaknya lebih kreatif dan inovatif agar

masyarakat tertarik dan ikut serta dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru.

- d. Meningkatkan kualitas aparatur pelaksana kebijakan PPDB Pemerintah Pusat /Pemerintah Daerah untuk terus memantau sehingga tidak terjadi kesalahan atau *miscommunication*.